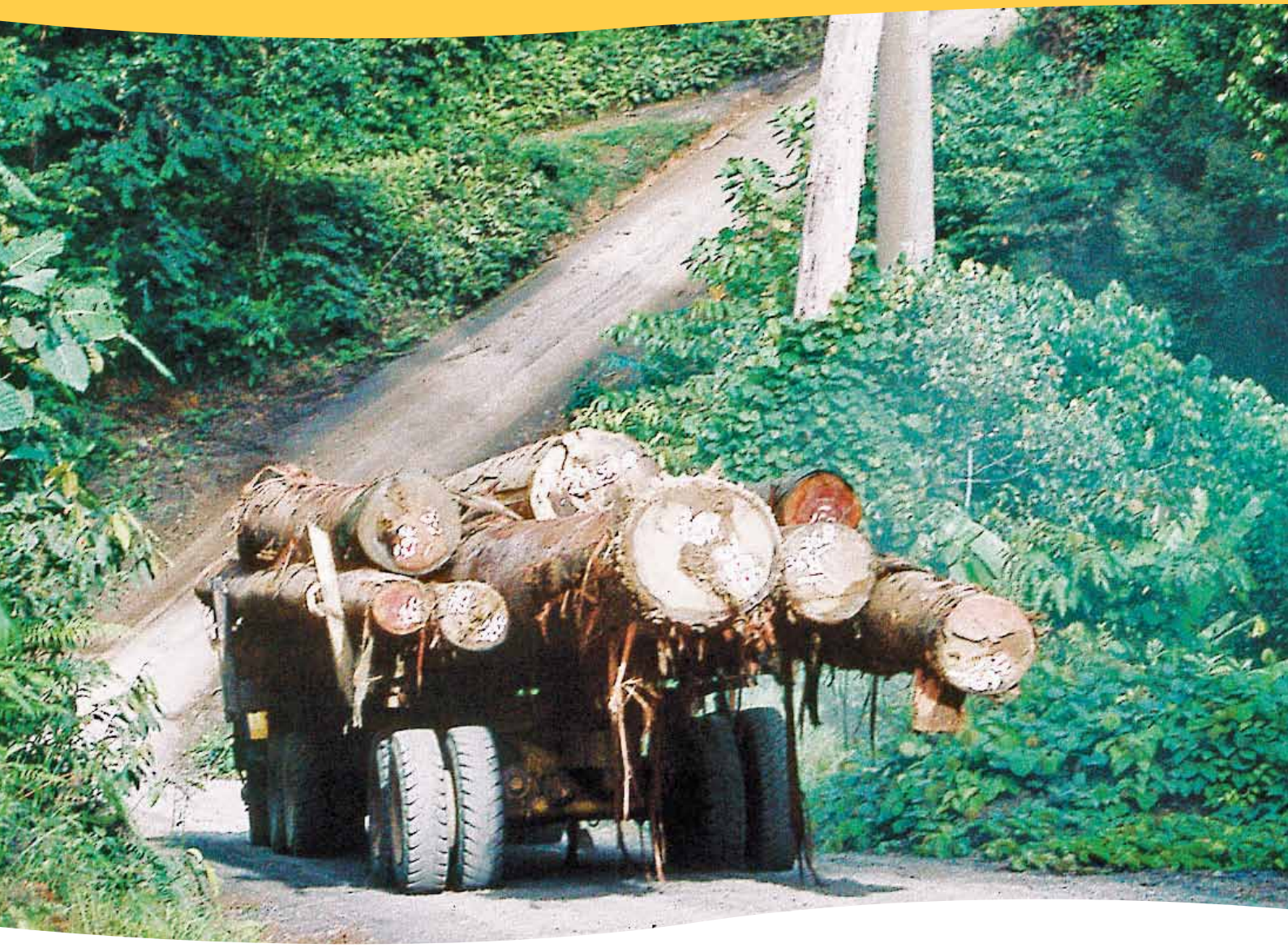

Laporan Ringkas

Mencegah Risiko Korupsi pada REDD+ di Indonesia

Ahmad Dermawan
Elena Petkova
Anna Sinaga
Mumu Muhajir
Yayan Indriatmoko

November 2011

CIFOR
UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

© 2011 United Nations Office on Drugs and Crime dan Center for International Forestry Research
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dermawan, A., Petkova, E., Sinaga, A., Muhajir, M. dan Indriatmoko, Y. 2011 Mencegah Risiko Korupsi pada REDD+ di Indonesia. Laporan Ringkas. United Nations Office on Drugs and Crime dan Center for International Forestry Research, Jakarta dan Bogor, Indonesia.

Diterjemahkan dari:
Dermawan, A., Petkova, E., Sinaga, A., Muhajir, M. and Indriatmoko, Y. 2011 Preventing the risks of corruption in REDD+ in Indonesia. Summary report. United Nations Office on Drugs and Crime and Center for International Forestry Research, Jakarta and Bogor, Indonesia.

Laporan lengkap dalam bahasa Inggris tersedia di perpustakaan online kami di http://www.cifor.org/online-library/.

Foto sampul depan oleh Charlie Pye-Smith

CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede
Bogor Barat 16115
Indonesia

T +62 (251) 8622-622
F +62 (251) 8622-100
E cifor@cgiar.org

www.cifor.org

Apapun yang dinyatakan dalam publikasi ini merupakan pendapat para penulis. Pendapat tersebut tidak serta merta mencerminkan pendapat CIFOR, lembaga bernaung para penulis atau pihak-pihak yang mendanai publikasi ini.

Mencegah Risiko Korupsi pada Proyek REDD+ di Indonesia

Ahmad Dermawan, Elena Petkova, Anna Sinaga, Mumu Muhajir dan Yayan Indriatmoko

Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) merupakan mekanisme yang dirancang di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) untuk meningkatkan peranan hutan dalam mengurangi perubahan iklim. UNFCCC dan badan-badannya telah memperluas konsep tersebut untuk memasukkan peningkatan stok karbon, konservasi, dan pengelolaan hutan berkelanjutan di negara-negara berkembang, atau REDD+. REDD+ memiliki potensi mengubah insentif untuk deforestasi dan perubahan tata guna lahan dan mendorong pengelolaan hutan secara lestari. REDD+ menjanjikan peran hutan Indonesia yang signifikan dalam usaha global untuk melakukan mitigasi perubahan iklim, juga sebagai sumber penerimaan baru untuk Indonesia dengan menghindari deforestasi dan merehabilitasi hutan yang terdegradasi.

Sementara berbagai kesepakatan internasional mengenai REDD+ di bawah UNFCCC masih dinegosiasikan, REDD+ tengah berkembang menjadi mekanisme sukarela, baik bilateral maupun multilateral. Sejumlah bantuan pembangunan yang signifikan melalui skema Official Development Assistance (ODA) telah dijanjikan untuk menciptakan kondisi yang mendukung bagi REDD+ dan berbagai kegiatan percontohan di negara-negara tropis yang kaya akan hutan, termasuk Indonesia. Diharapkan bahwa pada akhirnya ODA akan digantikan dengan pembayaran untuk pengurangan emisi karbon dalam pasar kredit karbon hutan yang beroperasi penuh.

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai kebijakan dan peraturan, mengembangkan mekanisme koordinasi dan memulai proyek-proyek percontohan untuk mempersiapkan REDD+ sejak 2007. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil sejumlah langkah untuk meredam korupsi, termasuk di sektor kehutanan, dengan memperkuat peraturan perundangan dan melibatkan badan-badan independen dalam memantau berbagai kegiatan dan lembaga terkait kehutanan. Namun, negara ini masih membutuhkan waktu dan usaha yang berarti untuk mengurangi korupsi.

Fase kesiapan REDD+ di Indonesia melibatkan sejumlah reformasi dan keputusan yang memiliki cakupan yang luas. Beberapa keputusan akan mempunyai dampak jangka panjang pada para pelaku yang terkait kehutanan. Sejumlah inisiatif lainnya mencoba membangun prosedur pengaturan REDD+ yang lebih jelas. Kedua hal tersebut akan mempengaruhi sejauh mana keberhasilan REDD+ selama fase penerapan, dan bagaimana REDD+ dapat terlaksana. Oleh karenanya, keberhasilan pencegahan korupsi akan mempengaruhi pihak yang akan mendapat manfaat dari REDD+, dan bagaimana hal tersebut akan diterapkan.

Kekayaan hutan di Indonesia telah menciptakan berbagai faktor dan kepentingan tertentu dan menjadikan sektor kehutanan sangat rentan terhadap korupsi. Pertama, proyek-proyek besar yang melibatkan dana publik triliunan rupiah – atau mampu menghasilkan kekayaan yang sangat besar – terdapat dalam sektor kehutanan. Ke dua, berbagai konsesi dan izin untuk kegiatan kehutanan menawarkan sumber penerimaan yang signifikan bagi pemerintah. Sebuah contoh ialah penyalahgunaan Dana Reboisasi untuk memperkaya kaum elit. Ke tiga,

pembalakan liar dan korupsi yang terkait dengannya sudah lama diketahui sebagai masalah serius dan pemicu deforestasi, dan juga telah mengakibatkan kehilangan pendapatan negara yang besar di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah bergerak maju dengan sejumlah inisiatif antikorupsi. Kemajuan yang cukup berarti telah dicapai. Namun, dengan tata kelola yang lemah dalam sektor kehutanan, risiko korupsi pada REDD+ tetap tinggi di Indonesia.

REDD+ akan terbentuk melalui tiga fase utama. Selama fase kesiapan, negara-negara tropis membangun kerangka kerja kelembagaan dan kebijakan. Selama fase penerapan, strategi dan tindakan di tingkat nasional diberlakukan. Pada fase ke tiga, pembayaran berbasis kinerja dilakukan untuk pengurangan emisi karbon yang terverifikasi. Korupsi yang mungkin terjadi dalam fase kesiapan akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan nasional, dan dengan demikian mungkin melibatkan individu dan grup yang memiliki akses terhadap kekuasaan, seperti para politisi, perusahaan kayu, agribisnis, dan kemungkinan pihak militer, yang mungkin menjaring berbagai peluang yang disajikan oleh REDD+ untuk 'menghalalkan' korupsi. Oleh karenanya, korupsi selama fase kesiapan akan mempengaruhi tingkat risiko korupsi dalam fase-fase REDD+ berikutnya.

Korupsi di arena kebijakan REDD+ mungkin akan menghambat berbagai usaha untuk mengurangi konversi hutan. Hal tersebut mungkin juga mempengaruhi rancangan kebijakan dan lembaga baru, sehingga praktik korupsi dapat terus berlanjut di bawah REDD+. Bila risiko korupsi muncul, kemungkinan hanya ada sedikit perbaikan dalam perencanaan tata guna lahan jangka panjang dan berbagai masalah utama tenurial lahan tidak akan ditangani. Kegagalan untuk menangani masalah ini akan mengganggu strategi nasional REDD+ dalam menyelaraskan berbagai sasaran pembangunan dan mitigasi perubahan iklim.

Fase kesiapan REDD+ di Indonesia sudah melibatkan banyak dana publik, terutama donor, maupun investasi swasta yang jumlahnya terus meningkat. Fase ini juga melibatkan interaksi yang rumit di antara para pelakunya. Keberhasilan penggunaan dana ini untuk reformasi kebijakan dan pergeseran menuju pembangunan rendah-karbon akan memerlukan kerjasama antar berbagai lembaga. Sejak tahun 2007, Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa mekanisme baru untuk mengoordinasikan perkembangan kebijakan REDD+, misalnya the Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA), Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), tiga kelompok kerja REDD+ dan Satuan Tugas REDD+.

Namun, kelompok tertentu dengan koneksi kuat dan akan mendapatkan kerugian atau keuntungan yang besar akan menjadi faktor penentu utama terjadinya korupsi dalam pembuatan kebijakan. Kewenangan yang tidak jelas, adanya beragam kepemimpinan dan peran serta mandat dengan dukungan legal; kebijakan yang tidak konsisten; peluang untuk keputusan-keputusan yang sepihak; dan kurangnya data yang akurat dan dapat diakses oleh publik dapat memfasilitasi korupsi atau memungkinkan adanya pengaruh yang tidak baik terhadap pengambilan keputusan.

Pengalaman masa lalu telah menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan keuangan yang buruk, kaum elit yang bertindak di luar aturan tanpa mendapat hukuman dan tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban (termasuk pemantauan dan verifikasi laporan dan transaksi keuangan) telah membawa pada korupsi dan penyalahgunaan dana-dana kehutanan. Bila terulang lagi atau tidak ditangani dengan benar, kondisi-kondisi ini sangat berisiko menciptakan korupsi dalam keuangan terkait perubahan iklim di Indonesia. Kegagalan dalam mengantisipasi berbagai risiko ini akan membahayakan efektivitas REDD+ untuk memenuhi target pengurangan emisi dan penerimaan negara yang terkait dengannya.

Korupsi dan kecurangan dapat juga mempengaruhi distribusi pendapatan. Satu sumber kerentanan terhadap praktik korupsi atau kecurangan adalah adanya jaringan kelompok tertentu dan rekam jejak mereka dalam memenuhi kewajiban kontraknya. Pembayaran dan pengelolaan pendapatan pada berbagai tingkat pemerintah menghadirkan beberapa tantangan. Pertama adalah penundaan pembayaran dan pembelanjaan – suatu masalah yang sering terjadi dalam penyaluran dana yang besar ketika kapasitas pengelolaan keuangan rendah. Persetujuan mengenai pembagian pendapatan REDD+ di masa mendatang dan pengalokasiannya melibatkan banyak interaksi bolak balik antara pemerintah kabupaten, provinsi,

dan pusat. Hal ini pada gilirannya akan menunda pelaksanaan dari program-program pembangunan pemerintah, terutama di daerah.

Pendapatan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Provisi Sumber Daya Hutan ditransfer ke rekening Kementerian Kehutanan untuk kemudian didistribusikan ke berbagai rekening daerah. Pada tingkat provinsi dan kabupaten, dana tersebut diserap ke dalam anggaran daerah, yang berarti bahwa dana tersebut mungkin digunakan atau tidak digunakan untuk kegiatan terkait kehutanan. Dalam banyak kasus, pendapatan hutan yang dibagikan bahkan tidak cukup untuk menutup anggaran karyawan dan operasional kantor-kantor kehutanan provinsi atau kabupaten.

Batas konsesi hutan yang tidak ditetapkan dengan baik, serta kejelasan hak dan batas-batas hutan yang hilang menciptakan kemungkinan untuk korupsi dalam perizinan proyek REDD+. Tidak adanya informasi mengenai kondisi hutan merupakan faktor lain yang memfasilitasi terjadinya korupsi. Peraturan-peraturan mengenai perizinan mensyaratkan kepada para pemohon proyek REDD+ untuk menentukan area hutan yang dimohon dan memastikan bahwa wilayah tersebut bebas dari hak-hak lainnya. Namun saat ini tidak ada mekanisme untuk memastikan bahwa kriteria-kriteria tersebut dipenuhi. Meskipun izin konsesi hutan tanaman dan restorasi ekosistem harus dikeluarkan hanya untuk hutan terdegradasi dan bebas dari hak-hak lain, banyak permohonan yang diajukan untuk lahan dengan kondisi hutan yang masih baik atau yang sudah ditempati. Kesulitan dalam mengidentifikasi lahan dan tidak adanya data dapat juga mempersulit para pemohon dalam memenuhi kriteria lahan yang sesuai untuk jenis-jenis izin tertentu dan memungkinkan penyalahgunaan dan manipulasi, yang mungkin melibatkan penyuapan.

Risiko ini sangat berbahaya untuk REDD+ karena, bila terwujud, akan memungkinkan para pemegang konsesi REDD+ untuk melakukan deforestasi sebelum periode penghitungan dimulai, yang kemudian mengubah tingkat acuan dan mengacaukan perhitungan karbon nasional. Korupsi dalam proses perizinan mungkin juga mengarah kepada perampasan lahan berskala besar, pelanggaran terhadap hak-hak tenurial yang sudah ada, dan sengketa atas lahan, di mana pihak yang kalah adalah masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan.

Sistem untuk rekonsiliasi produksi hutan dan laporan pembayaran yang ada saat ini belum memadai. Di Indonesia, ada sedikitnya dua belas pelaku yang terlibat dalam memeriksa kesesuaian hasil produksi dan laporan pembayaran dengan batas waktu yang ketat. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan dalam beberapa kasus bahwa proses pemeriksaan kesesuaian tidak dilakukan secara teratur. Bila kelemahan ini terjadi juga di bawah mekanisme REDD+, hal tersebut akan mengganggu perhitungan kredit yang tepat dan memicu korupsi, dengan memberi kesempatan kepada pemrakarsa untuk mengklaim kredit yang bukan haknya. Hal tersebut bahkan juga memungkinkan para pemrakarsa untuk melakukan bisnis seperti biasa sambil tetap memperoleh keuntungan dari kredit karbon. Pada akhirnya, hal ini akan mengacaukan perhitungan karbon nasional dan memiliki implikasi terhadap integritas REDD+ global.

Gambar 1 merangkum kondisi utama untuk korupsi dalam fase kesiapan dan hasil yang mungkin diperoleh.

Dengan demikian, ada beberapa risiko korupsi yang berhubungan dengan REDD+. Salah satunya ialah pengaruh yang tidak semestinya oleh jaringan politik baik di tingkat kebijakan maupun pada tingkat proyek. Risiko penguasaan kebijakan dapat mempengaruhi penggunaan lahan hutan, penerbitan perizinan, distribusi dana serta akses dan keuntungan dari pasar karbon, dan bahkan perhitungan pengurangan emisi dari berbagai proyek.

REDD+ tampaknya akan dikaitkan dengan peningkatan dana dan berbagai peluang baik untuk mendapatkan keuntungan maupun korupsi. Risiko terjadinya korupsi selalu ada ketika terdapat sejumlah besar uang dan ketika pasar dan mekanisme aliran dananya masih baru dimulai dan tengah berkembang.

Baik negosiasi internasional di bawah UNFCCC maupun pergeseran progresif di pusat-pusat kekuasaan dan kepemimpinan dalam debat REDD+ di Indonesia ditandai oleh ketidakpastian yang tinggi. Peraturan yang membingungkan, tidak adanya

Gambar 1. Risiko korupsi dan hasil pada fase kesiapan REDD+

informasi dan data, persaingan dalam hal otoritas dan hak atas lahan telah menciptakan landasan yang kompleks dan meningkatkan ketidakpastian ini. Kerumitan dan ketidakpastian ini juga menciptakan risiko korupsi yang lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi rancangan REDD+, sehingga memastikan kelompok tertentu mempertahankan akses mereka ke sumber daya hutan. Hal ini juga akan merusak kepercayaan – suatu kondisi penting untuk setiap pasar.

Kebijakan, perizinan dan aturan-aturan pembagian manfaat mungkin berujung pada terciptanya kelemahan-kelemahan struktural dan insentif menyimpang yang memungkinkan pembukuan kreatif, proyek-proyek yang tidak menghasilkan pengurangan emisi, pelaporan pengurangan emisi yang palsu, perhitungan ganda, manipulasi tingkat acuan, penyajian yang keliru tentang proyek dan cara-cara lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Hal-hal ini mungkin akan melibatkan korupsi juga pada tahap tertentu.

Isu-isu kebijakan yang penting yang perlu ditangani untuk membatasi korupsi dan manipulasi keputusan terkait dengan:

1. menetapkan dan memetakan batas hutan negara dan memberikan pengakuan atas hutan dan lahan milik masyarakat yang bergantung pada hutan dan masyarakat adat;
2. mengintegrasikan sasaran-sasaran yang diuraikan dalam Strategi Nasional REDD+ ke dalam kebijakan tata guna lahan;
3. memperjelas dan secara konsisten menerapkan kriteria untuk konversi hutan; dan
4. menutup celah-celah peraturan dan menghasilkan data dan menjadikannya dapat diakses publik untuk mendukung pembuatan kebijakan yang mendapatkan informasi yang cukup.

Pemerintah Indonesia sudah bekerja untuk menangani beberapa dari isu-isu ini. Selebihnya, walau sudah dipahami sebagai masalah, belum ada keputusan yang diambil. Banyak dari keputusan-

keputusan ini sulit untuk diambil dan tidak dapat dilaksanakan dalam semalam. Inilah sebab pentingnya memilah isu yang diprioritaskan dan menetapkan kerangka waktu dan tenggat yang jelas. Pemilihan isu prioritas penting untuk pemerintah guna memantau kemajuan, seperti halnya untuk para donor, kalangan bisnis dan publik. Hal tersebut akan menciptakan lingkungan kebijakan yang dapat diprediksi dan mampu menyesuaikan dengan lingkungan REDD+ yang dinamis dan akan membangun kepercayaan terhadap pasar REDD+. Menciptakan berbagai sistem untuk memantau kemajuan dalam memperkenalkan kebijakan dan mencapai sasaran merupakan sebuah langkah penting dalam memastikan pertanggungjawaban dan mengurangi risiko terjadinya korupsi. Dalam melakukan hal tersebut, pertanyaan-pertanyaan kunci seperti di bawah ini harus dipertimbangkan.

1. Apakah manfaat dan risiko dalam melibatkan lembaga-lembaga yang sudah ada dibandingkan dengan menciptakan institusi baru?
2. Kapasitas apakah yang diperlukan untuk menangani setiap isu, dan apakah ada upaya-upaya yang efektif untuk membangun kapasitas tersebut?
3. Apakah tingkat atau lembaga yang tepat untuk melakukan setiap tugas yang berkaitan dengan REDD+?
4. Risiko dan pertentangan apa yang mungkin terjadi untuk setiap pilihan keputusan?

Langkah-langkah tersebut akan menciptakan kebijakan lingkungan yang stabil serta dapat diprediksi dan mengurangi medan konflik institutional.

Selain memastikan lingkungan kebijakan yang stabil, dapat diprediksi dan jelas, Pemerintah Indonesia dapat mengambil beberapa langkah lain untuk mencegah dan membatasi korupsi. Salah satunya adalah dengan mendorong transparansi yang lebih besar. Proses yang sepenuhnya transparan yang menentukan secara jelas opsi-opsi pembangunan dan posisi para pemangku kepentingan akan mengurangi peluang untuk tawar-menawar di belakang layar mengenai kebijakan dan peraturan.

Namun, mengurangi korupsi memerlukan lebih dari membangun proses transparan dan inklusif. Perlu kepemimpinan, pengambilan keputusan dan peran-peran pelaksanaan yang jelas di antara berbagai lembaga yang terlibat, prioritas yang jelas dalam pelaksanaan dengan kerangka waktu yang telah ditentukan, dan informasi geografis yang mutakhir dan dapat diakses publik mengenai lokasi, kondisi dan aktivitas hutan. Pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah-langkah spesifik untuk menangani isu-isu ini dan meningkatkan transparansi.

Banyak dari langkah ini juga akan membantu meningkatkan pertanggungjawaban lembaga. Memperkenalkan berbagai proses untuk akuntabilitas dan pengawasan serta peninjauan independen merupakan hal yang penting bagi semua lembaga dalam berbagai usaha yang tengah dilakukan. Untuk itu, suatu sistem pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances)* perlu dibangun ke dalam struktur inti REDD+, baik itu merupakan struktur yang menerapkan kebijakan atau mengelola dana, melaksanakan pencatatan maupun pelaporan REDD+. Pemisahan mandat dan fungsi yang jelas juga diperlukan. Dengan adanya pengalaman masa lalu dengan keuangan kehutanan di Indonesia, pertimbangan khusus harus diberikan kepada upaya mengenalkan sistem pemantauan dan pengawasan keuangan yang independen dan juga investasi yang signifikan dalam membangun kapasitas pengelolaan keuangan bersama dengan penguatan kepemilikan pemerintah nasional. Meninjau berbagai sistem dalam penyesuaian data pada laporan dan perampingan juga akan membatasi peluang untuk manipulasi dan korupsi. Berbagai lembaga nasional yang dimandatkan untuk memerangi korupsi dan pencucian uang harus dilibatkan secara lebih menyeluruh dalam pemantauan keuangan dan audit terhadap keuangan terkait perubahan iklim.

Data yang akurat dan mutakhir yang mendukung klasifikasi lahan hutan untuk berbagai penggunaan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, dan fokus yang lebih kuat pada hutan bernilai tinggi dan pembuatan batas kawasannya, akan membatasi korupsi dan manipulasi terhadap berbagai usaha yang sedang dilakukan. Melaporkan kemajuan kepada publik akan lebih memperkuat pertanggungjawaban.

Prinsip dan standar antikorupsi harus diintegrasikan sebagai unsur inti dalam rancangan REDD+

di Indonesia. Memperjelas berbagai peran dan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam REDD+ akan memastikan penerapan sejumlah kebijakan dan peraturan anti korupsi dan anti pencucian uang yang ada dan akan membantu memantau berbagai proses, praktik serta perusahaan dan individu kunci yang ditetapkan sebagai *politically exposed*. Namun, berbagai risiko korupsi yang berbeda memerlukan upaya dan tingkat kebutuhan yang berbeda. Risiko korupsi tertinggi saat ini terletak dalam pembuatan kebijakan, proses pengembangan kebijakan dan perizinan. Para pembuat kebijakan bertujuan untuk melakukan beberapa perubahan untuk membatasi konversi hutan. Penetapan batas lahan, data yang akurat dan menutup berbagai celah peraturan merupakan tiga target utama dalam usaha mengendalikan korupsi karena hal-hal tersebut akan mempengaruhi tata guna lahan di masa depan dan dapat mendukung perubahan yang lebih nyata. Peraturan perizinan memberi kekuatan hukum sejumlah proyek yang sudah berjalan dan dengan demikian juga bersifat penting. Sejalan dengan berkembangnya REDD+, risiko korupsi akan meningkat dalam distribusi dana REDD+ dan penyesuaian data laporan proyek.

Tidak semua isu ini dapat ditangani oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Para donor internasional dapat juga memainkan peran penting. Para donor dapat menyediakan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas, terutama kapasitas staf pemerintahan pada tingkat subnasional. Para donor dapat membantu tidak hanya pada sektor kehutanan di mana isu-isu teknis seperti pengembangan peta kehutanan atau administrasi pendapatan di dalam dan antar lembaga bersifat penting, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas lembaga audit dan anti-korupsi.

CIFOR berterimakasih atas bantuan United Nations Office on Drugs and Crime dan dukungan finansial dari Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta. Laporan ini tidak serta merta mencerminkan pandangan United Nations Office on Drugs and Crime dan Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta. Untuk mengunduh laporan lengkap dalam bahasa Inggris silakan kunjungi http://www.cifor.org/online-library/.

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

NORWEGIAN EMBASSY

www.cifor.org

www.ForestsClimateChange.org

CIFOR

Center for International Forestry Research
CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan salah satu dari 15 pusat penelitian dalam Kelompok Konsultatif bagi Penelitian Pertanian International (Consultative Group on International Agricultural Research – CGIAR). CIFOR berkantor pusat di Bogor, Indonesia dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

CGIAR